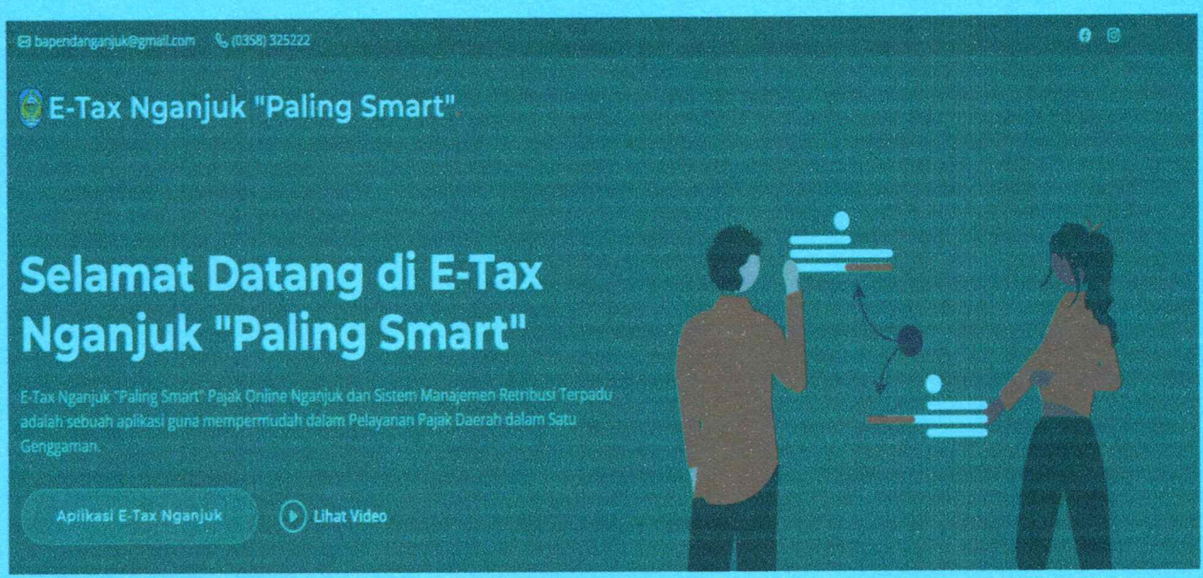
Bapenda Kabupaten Nganjuk

#PANTAS PAJAK LUNAS PEMBANGUNAN TUNTAS

RANKIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH



MEMBAYAR PAJAK NON TUNAI CEPAT, MUDAH,MURAH,AMAN,HANDAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

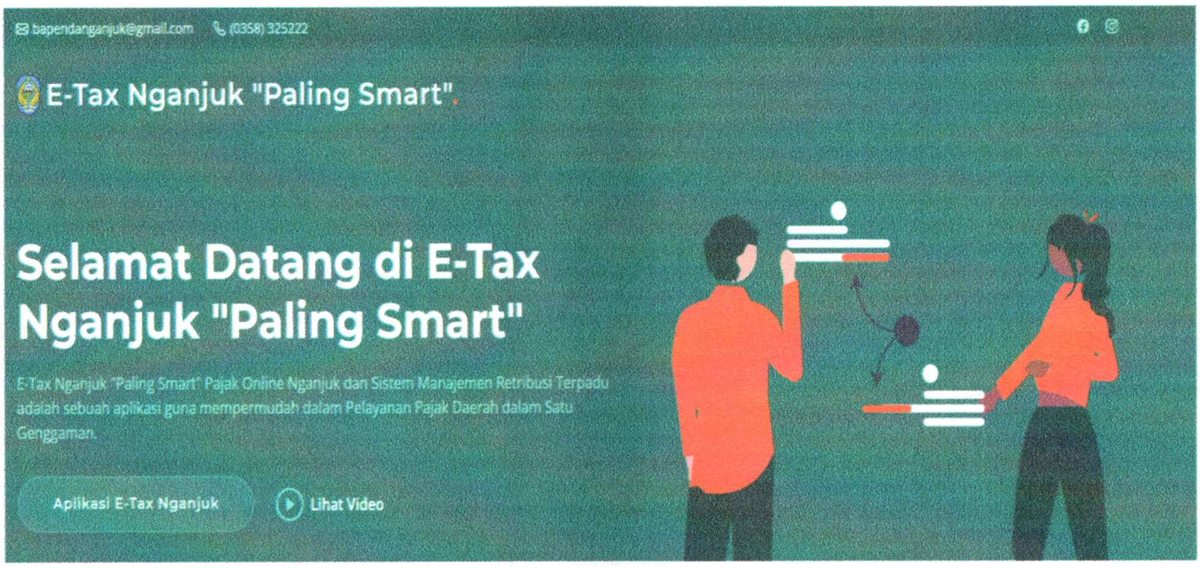
Bapenda Kabupaten Nganjuk

#PANTAS PAJAK LUNAS PEMBANGUNAN TUNTAS

RANKIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH



MEMBAYAR PAJAK NON TUNAI CEPAT, MUDAH,MURAH,AMAN,HANDAL

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada

ketentuan Pasal 126 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah
35. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
b. Mengopmtimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
c. Mengakomodir pergeseran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
d. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan; dan
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah triwulan I Tahun 2025;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Tugas Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan dapat dilaporkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (sampai dengan triwulan I) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)
Badan Pendapatan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d 2025	Tingkat Realisasi (%)
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasai Target Renstra (%)		
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
KEUANGAN											

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai Sakip SKPD**	BB (75,80)								BB		BB		BB					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai**	**13**	**dok**	**53**	**dok**	**12**	**dok**	**17**	**Dok**	**141,67**	**13**	**Dok**	**83,00**	**6,38**	**4**	**dok**	**31**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, yang selesai	6	dok	12	dok	**6**	dok	10	Dok	166,67	6	Dok	28,00	4,67	1	dok	17		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi yang selesai	7	Lap	41	dok	6	dok	7	Dok	116,67	7	Dok	55,00	7,86	3	Lap	43		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Keuangan yang selesai**	**42**	**Dok**	**65**	**dok**	**75**	**dok**	**82**	**Dok**	**109,33**	**71**	**Dok**	**218,00**	**5,19**	**2**	**Dok**	5		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang	20	Orang	45	Orang	**44**	Orang	97,78	45	Orang	109,00	2,42	36	Orang	80		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Lap	1	lap	1	lap	1	Lap	100,00	1	Lap	3,00	3,00	1	Lap	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan, bulanan,triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun	18	Lap	44	lap	29	lap	37	Lap	127,59	37	Lap	118,00	6,56	4	Lap	22
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**1**	**dok**	**1**	**dok**	**1**	**dok**	**4**	**Lap**	**400,00**	**1**	**Lap**	**6,00**	**6,00**	**1**	**dok**	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1	dok	1	dok	1	dok	4	Dok	400,00	1	Dok	6,00	6,00	1	dok	100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Laporan Tingkat kehadiran ASN**	**12**	**Lap**	**-**	**dok**	**12**	**dok**	**12**	**Dok**	**100,00**	**12**	**Dok**	**24,00**	**2,00**		**Lap**	**-**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	48	Orang	88	orang	44	orang	43	Orang	97,73	44	Orang	175,00	3,65		Orang	-
Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100,00	12	Dok	36,00	3,00		Dok	-
SubKeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	44	Orang	44	orang	44	org	63	Orang	143,18	63	Orang	170,00	3,86		Orang	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi umum yang**	**12**	**Lap**	**12**	**Lap**	**12**	**Lap**	**12**	**Lap**	**100,00**	**12**	**Lap**	**36,00**	**3,00**	**3**	**Lap**	**25**

	dilaksnakan											
Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen listrik yang tersedia		29 Paket	10 Paket		13	130,00	10		52,00			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	13 Paket	10		10	100,00	90 Paket		113,00	0,84	3 Paket	2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik Kantor Bapenda	60 Paket	67 Paket	60 Paket		63 Paket	105,00	60 Paket		190,00	3,17	1 Paket	2
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	118.096 paket	124.273 paket	101.000 paket		169.161 paket	167,49	118.096 paket		411.530,00	3,48	6.506 paket	6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1.120	Paket	1.121	Paket	1.120	Paket	1.110	Paket	99,11	1.120	Paket	3.351,00	2,99		Paket	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap	12	Lap	12	Lap	12	Lap	100,00	12	Lap	36,00	3,00	1	Lap	8
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	12	Lap	12	Lap	12	Lap	100,00	12	Lap	36,00	3,00		Lap	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100,00	12	Dok	36,00	3,00		Dok	-
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Lap		Lap		Lap		Lap		-		-			Lap	

Elektronik Pada SKPD																		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**20**	**Unit**	**20**	**Unit**	**34**	**unit**	**23**	**unit**	**67,65**	**2**	**Lap**	**45,00**	**2,25**		**Lap**	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan			-			unit	-	unit		187	Unit	187,00			unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor yang di adakan	20	unt	20	unit	34	Unit	23	Unit	67,65	16	Unit	59,00	2,95		unt	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakeanakan**	**3**	**jasa**	**27**	**jasa**	**3**	**Jasa**	**27**	**Jasa**	**900,00**	**3**	**Jasa**	**57,00**	**19,00**	**9**	**jasa**	300	
Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Lap	12	Lap	12	Lap	12	Lap	100,00	12	Lap	36,00	3,00	3	Lap	25	

Menyurat	Surat Menyurat																		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	12	Lap	12	Lap	12	Lap	100,00	12	Lap	36,00	3,00	3	Lap	25		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	12	Lap	12	Lap	12	Lap	100,00	12	Lap	36,00	3,00	3	Lap	25		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**52**	**unit**	**52**	**unit**	**72**	**unit**	**74**	**unit**	**102,78**	**52**	**unit**	**178,00**	**3,42**		**unit**	-		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	19	unit	19	unit	19	unit	19	unit	100,00	19	unit	57,00	3,00	1	unit	5
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang dipelihara	10	unit	14	unt	17	unit	17	unit	100,00	10	unit	41,00	4,10		unit	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat	22	unit	45	unit	35	unit	47	unit	134,29	22	unit	114,00	5,18		unit	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yangterpelihara	1	gedung	1	gedung	1	gedung	1	gedung	100,00	1	gedung	3,00	3,00		gedung	-

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	992.700	WP		-	-		667.000	WP	667.000,00	67%		WP	-
	Jumlah Wajib Pajak Baru	386.000	WP		-	-		2.000,00	WP	2.000,00	1%		WP	-
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100	%		-	-		100,00	%	100	100%		%	-
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100	%		-	-		100,00	%	100	100%		%	-
	Prosentase Kenaikan Pajak Daerah	4,21	%									1.092	%	25.938
	Prosentase Kenaikan Retribusi Daerah	4,14	%									1.723	%	41.618
	Prosentase Kenaikan Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah	16,20	%									2.479	%	15.302

	Prosentase Kenaikan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	0,74 %								3.519 %	475.541
Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	992.700 WP		-	-		667.000 WP	667.000	67%	WP	-
	Jumlah Wajib Pajak Baru	386.000 WP		-	-		2.000,00 WP	2.000	1%	WP	-
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100 %		-	-		100,00 %	100	100%	%	-
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100 %		-	-		100,00 %	100	100%	%	-
	Prosentase Wajib Pajak/Wajib Pungut yang Patuh	90,50 %									-
	Prosentase Kenaikan Objek/Subjek Pajak Baru	1,50 %								2.914	194.267

	Prosentase subyek/obyek pajak yang dimutakhiran	1,45	%														-
	IKM Pelayanan Pajak	85,38	%	85,30	%	90	%	88,48	%	98,31	85,00	%	85	100%	93,72	%	110
	Prosentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30,00	%														-
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan	3	Dok	3	Dok	3	Dok	3	Dok	100,00	3	Dok	9,00	3,00	1	Dok	33
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dok		Dok	1		3	Dok	300,00	2	Dok	5,00	5,00		Dok	-

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Lap	11	Lap	2	Lap	4	Lap	200,00	12	Lap	27,00	2,25	3	Lap	25
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25	unit	25	Unit	25	Jenis	26	Jenis	104,00	25	Unit	76,00	3,04		unit	-
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Lap	12	Lap	12	Lap	12	Lap	100,00	12	Lap	36,00	3,00	3	Lap	25
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	2	Lap	3	Lap	2	Lap	3	Lap	150,00	2	Lap	8,00	4,00		Lap	-

Data Pajak Daerah	Basis Data Pajak Daerah																	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	3.000	OP	2.354	OP	6.250	OP	5.873	OP	93,97	3.000	OP	11.227,00	3,74	1.475	OP	49	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dok	24	Dok	24	Dok	24	Dok	100,00	24	Dok	72,00	3,00	6	Dok	25	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35.000	Layanan	24.184	Layanan	35.000	Layanan	34.955	Layanan	99,87	35.000	Layanan	94.139,00	2,69	1.144	Layanan	3	

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100,00	12	Dok	36,00	3,00	3	Dok	25
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok		12	Dok	36,00	3,00	3	Dok	25
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100,00	12	Dok	36,00	3,00	3	Dok	25
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100,00	12	Dok	36,00	3,00	3	Dok	25
Pembinaan dan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	12	Dok		Dok	3	Dok	1	lap	33		Dok	1,00	0,08		Dok	-

Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah										
Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Lap	Lap	4 Lap	4 Lap	100	12 Lap	16,00	1,33	Lap	-

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tribulan I Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Indikator Kinerja Program	Tingkat Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip SKPD	BB (78,15)
Program Pengelolaan Pendapatan	Prosentase Kenaikan Pajak Daerah	1,092%
	Prosentase Kenaikan Retribusi Daerah	1,723%
	Prosentase Kenaikan Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah	2,479%
	Prosentase Kenaikan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	3,519%

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Lokasi sulit terjangkau dengan SDM yang terbatas	Target tidak Optimal	1. Kerja sama dengan Pihak ketiga
1. Belum semua Subyek Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak	Target tidak optimal	- Melaksanakan Pendataan secara terus menerus - Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak
2. Wajib pungut kuatir apabila ditambah pajak, konsumen tidak mau membeli lagi	Realisasi tidak optimal	- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pungut - Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media sosiaal, pemasangan banner
3. Sistem Pengelolaan Pajak dan retribusi terganggu (virus, Hacker)	Penerimaan tertunda	Memasang alat untuk mengantisipasi virus, hacker
4. WP/WR tidak melaporkan pajak sesuai omset penjualan/penggelapan pajak	Realisasi tidak optimal	- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak - Melaksanakan pengawasan
5. Kurangnya kuantitas & kualitas SDM	Target dan realisasi tidak optimal	Mengusulkan sdm untuk mengikuti Bintek Pemeriksa Pajak, Analis Pajak, Juru sita, Penagihan pajak
6. Masih adanya piutang pajak	Realisasi tidak optimal	1. Menyusun TIM Penyelesaian Piutang Pajak 2. Verifikasi data piutang 3. Penghapusan piutang
7. Pembayaran Pajak Tunai	Penerimaan ada yang dibawa oleh petugas pungut	Sosialisasi pembayaran non tunai kepada masyarakat, wajib pungut baik secara tatap muka, media social, banner
8. Belum optimalnya penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil

9. Belum optimalnya penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil
10. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil

3.3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 5 Tahun sebagai berikut :

TABEL 2.1.1
REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2025 (TRIBULAN I)

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.616.757.661.539,00	2.687.352.190.308,02	102,70	2.452.965.706.266,00	2.501.196.777.618,99	101,97	2.444.412.672.174,00	2.602.437.761.443,24	106,46
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372.424.742.693,00	402.512.776.786,02	108,08	384.183.486.327,00	445.589.935.500,99	115,98	359.762.424.055,00	478.462.299.146,24	132,99
PENDAPATAN TRANSFER	2.190.454.229.144,00	2.234.991.486.508,00	102,03	1.910.407.441.736,00	1.906.100.240.092,00	99,77	1.975.606.394.507,00	2.020.931.609.297,00	102,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53.878.689.702,00	49.847.927.014,00	92,52	158.374.778.203,00	149.506.602.026,00	94,40	109.043.853.612,00	103.043.853.000,00	94,50

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	**2.554.078.999.348,00**	**677.661.098.101,58**	**26,53**	2.804.569.512.470,00	2.835.087.286.113,27	101,09
PENDAPATAN ASLI DAERAH	545.371.888.598,00	136.618.825.874,58	25,05	481.571.527.997,00	486.128.002.946,27	100,95
PENDAPATAN TRANSFER	2.008.707.110.750,00	541.042.272.227,00	26,93	2.322.997.984.473,00	2.348.959.283.167,00	101,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				0,00	0	

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yaitu:

- Prosentase PAD terhadap Pendapatan.
- Prosentase Kenaikan PAD

Hasil Analisis pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sampai dengan tribulan I dapat dilihat di Tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	20,00	19,48	20,50	17,15	105,04	-	85,75	539,22	-
Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	18,00	17,37	8,50	20,78	192	-	115,44	1.105	-

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

Dari tabel tersebut dapat di Evaluasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk pada tribulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Tujuan

   Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan Indikitor Prosentase PAD terhadap Pendapatan dengan perhitungan realisasi PAD di banding pendapatan di kali 100, sehingga capaian kinerja sampai dengan Tribulan I Tahun 2025 mencapai 105,04% dengan perhitungan sebagai berikut :

   - Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Rp 667.661.098.101,58
   - Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 136.618.825.874,58
   - Realisasi PAD terhadap Pendapatan 20,46
   - Target Tahun 2025 19,48
   - Capaian Kinerja 105,04

2. Sasaran

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Prosentase Kenaikan PAD, Capaian kinerja sampai dengan Tribulan I Tahun 2025 mencapai 192% dengan perhitungan sebagai berikut :

-	Realisasi PAD Tahun 2025 (Tribulan I)	Rp	136.618.825.874,58
-	Realisasi Pad Tahun 2024	Rp	102.430.252.132,31
-	Selisih	Rp	34.188.573.742
-	Prosentase Kenaikan PAD		33
	Target Prosentase Kenaikan PAD		17,37
-	Tahun 2024		
-	Capaian Kinerja		192

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah didukung dengan pendanaan dari APBD Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebagaimana tabel berikut:

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/SubKegiatan (Output)	KINERJA					ANGGARAN	REALISASI	%
		TARGET		REALISASI		%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB (75,80)		BB (78,15)			15.028.181.030,00	983.205.753,00	6,54
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang selesai	13	Dok	4	Dok	30,77	30.602.000,00	10.011.000,00	32,71
SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dok	1	Dok	16,67	15.275.000,00	4.026.500,00	26,36
SubKeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	7	Dok	3	Dok	42,86	15.327.000,00	5.984.500,00	39,05
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan yang selesai	3	Lap	2	Lap	66,67	13.123.996.929,00	754.657.505,00	5,75
SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang	36	Orang	80,00	13.078.936.929,00	748.632.755,00	5,72

SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1	Laporan	4	Laporan	400,00	6.738.000,00	6.024.750,00	89,41
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester	18	Laporan	4	Laporan	22,22	38.322.000,00	-	0,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	1	Dok	1	Dok	100,00	21.492.000,00	3.000.000,00	13,96
SubKeg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Dok	1	Dok	100,00	21.492.000,00	3.000.000,00	13,96
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Tingkat kehadiran ASN	12	Lap	-	Lap		67.965.000,00	-	0,00
SubKeg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dok	-	Dok		3.645.000,00	-	0,00
SubKeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	48	Orang	-	Orang		64.320.000,00	-	0,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan	12	Laporan	3	Laporan	25,00	424.787.106,00	47.350.736,00	11,15
SubKeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	135	Paket	3	Paket	2,22	116.483.680,00	15.758.100,00	13,53
SubKeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang tersedia	60	Paket	1	Paket	1,67	75.806.326,00	12.838.000,00	16,94

SubKeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096	Lembar	6.506	paket	5,51	44.999.600,00	10.003.500,00	22,23
SubKeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1.120	Lembar	-	Lembar		4.200.000,00	180.000,00	4,29
SubKeg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang terdia	12	Laporan	1	Laporan	8,33	9.210.000,00	495.000,00	5,37
SubKeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Laporan	-	Laporan		114.908.000,00	4.701.136,00	4,09
SubKeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis	12	Dok	-	Dok		59.179.500,00	3.375.000,00	5,70
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang diadakan**	**20**	**Unit**	-	**Unit**		**153.801.045,00**	-	0,00
SubKeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20	Unit	-	Unit		153.801.045,00	-	0,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa penunjang yang dilaksanakan**	**3**	**jasa**	**1**	**Jasa**	**33,33**	**900.518.600,00**	**142.753.762,00**	15,85
SubKeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	3	Laporan	25,00	7.169.500,00	526.400,00	7,34
SubKeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	12	Laporan	3	Laporan	25,00	247.180.000,00	43.376.222,00	17,55
SubKeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	12	Laporan	3	Laporan	25,00	646.169.100,00	98.851.140,00	15,30

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang dipelihara	52	Unit		Unit	0,00	305.018.350,00	25.432.750,00	8,34
SubKeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	19	Unit	1	Unit	5,26	200.060.850,00	19.324.750,00	9,66
SubKeg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	10	Unit	-	Unit		2.497.500,00	-	0,00
SubKeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	Unit	-	Unit		62.560.000,00	5.927.000,00	9,47
SubKeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	-	Unit		39.900.000,00	181.000,00	0,45
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Kenaikan Pajak Daerah	4,21	%	1.092	%	25942,19	3.908.246.000,00	202.822.650,00	5,19
	Prosentase Kenaikan Retribusi Daerah	4,14	%	1.723	%	41614,87			
	Prosentase Kenaikan Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah	16,2	%	2.479	%	15299,58			
	Prosentase Kenaikan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	0,74	%	3.519	%	475540,47			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase Wajib Pajak/Wajib Pungut yang Patuh	90,50	%	2.914	%	194.267	3.908.246.000,00	202.822.650,00	5,19
	Prosentase Kenaikan Objek/Subjek Pajak Baru	1,50	%		%				
	Prosentase Subjek/Obyek Pajak yang ditetakhiran	1,45	%		%				

	IKM Pelayanan Pajak	85,38	%	93,72	%	109,77			
	Prosentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	30,00	%		%				
SubKeg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah yang dilaksanakan	3	Dok	1	Dok		124.775.250,00	4.951.750,00	3,97
SubKeg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dok	-	Dok		71.921.200,00	2.798.300,00	3,89
SubKeg. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	3	Laporan		320.063.000,00	18.680.500,00	5,84
SubKeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25	Unit	-	Unit		455.535.800,00	6.942.300,00	1,52
SubKeg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12	Laporan	3	Laporan		339.616.700,00	25.301.000,00	7,45
SubKeg. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2	Laporan	-	Laporan		206.040.550,00		0,00
SubKeg. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	3.000	OP	1475	OP		35.859.500,00	-	0,00

SubKeg. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dok	6	Dok	25,00	131.082.000,00	75.698.000,00	57,75
SubKeg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	35.000	Layanan	1.144	Layanan		69.865.000,00	8.344.800,00	11,94
SubKeg. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah	12	Dok	3	Dok	25,00	1.217.782.050,00	18.120.000,00	1,49
SubKeg. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	12	Dok	3	Dok	25,00	573.858.700,00	9.186.000,00	1,60
SubKeg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	12	Dok	3	Dok		40.488.250,00	3.975.000,00	9,82
SubKeg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dok	3	Dok	25,00	261.813.600,00	19.205.000,00	7,34
SubKeg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	3	Laporan	25,00	59.544.400,00	9.620.000,00	16,16
JUMLAH							18.936.427.030,00	1.186.028.403,00	6,26

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator Nilai Sakip dengan target BB (75,80) terealisasi BB (78,15). Dan penyerapan Anggaran sebesar Rp983.205.753,00 atau 6,54% dari anggaran Rp15.028.181.030,00

   Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Indikator Kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan target kinerja 13 dokumen realisasi 4

Dokumen sehingga capaian kinerja 30,77%. Dan Penyerapan Anggaran sebesar Rp10.011.000,00 atau 32,71% dari anggaran sebesar Rp30.602.000,00,-. Kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator Jumlah Dokumen yang disusun dengan target 6 dokumen realisasi 1 dokumen capaian kinerja 16,67% yaitu DPA Tahun 2025. Dan Penyerapan Anggaran sebesar Rp4.026.500,00 atau 26,36% dari anggaran sebesar Rp15.275.000,00.

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah dokumen yang disusun dengan target 7 dokumen realisasi 3 dokumen capaian 42,86 % yaitu:

- LKPJ
- LKJIP
- Laporan Evaluasi Pembangunan Tribulan I

dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp5.984.500,00 atau 39,05% dari anggaran sebesar Rp15.327.000,00.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Keuangan yang selesai dengan target 42 dokumen yaitu Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan bulanan Pengeluaran dan penerimaan, Laporan semesteran, dengan realisasi 2 dokumen, sehingga capaian kinerja tercapai 4,76%, sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp754.657.505,00,- atau 5,75% dari target anggaran sebesar Rp13.123.996.929,00,- kegiatan ini terdiri dari :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Jumlah Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 45 orang realisasi 36 orang yang dibayar gaji dan tunjangan sehingga tercapai 80,00% dikarenakan adanya mutasi dan purna tugas. Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp748.632.755,00 atau 5,72% dari target anggaran sebesar Rp13.078.936.929,00,-

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan Keuangan Bapenda

Tahun 2025 dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp6.024.750,00 atau 89,41% dari target anggaran sebesar Rp6.738.000,00,-

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Indikator jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dengan target 18 Laporan realisasi 4 Laporan dengan capaian 22,22% yaitu:

- 2 Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran
- 2 Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan

Untuk realisasi anggaran masil nol dikarenakan masih proses efisiensi anggaran dan untuk Uang Persediaan (UP) baru diterima tanggal 10 Februari 2024 dari target anggaran sebesar Rp38.322.000,00,-

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah dari target kinerja 1 dokumen yaitu buku Inventaris barang dan Untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 atau 13,96% dari target anggaran sebesar Rp21.492.000,00,- kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 12 Dokumen, Untuk realisasi anggaran masil nol dikarenakan masih proses efisiensi anggaran dan untuk Uang Persediaan (UP) baru diterima tanggal 10 Februari 2024 dari target anggaran sebesar Rp67.965.000,00 kegiatan ini terdiri dari:

1.4.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja 12 Dokumen.

1.4.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Indikator Jumlah Orang yang mengikuti

bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 48 Orang.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator jumlah Laporan administrasi umum dengan target kinerja 12 laporan, realisasi 3 laporan sehingga capaian 25,00%, dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp47.350.736,00 atau 11,15% dari target anggaran sebesar Rp424.787.106,00,- kegiatan ini terdiri dari:

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target kinerja 135 paket, realisasi 3 paket sehingga tercapai sebesar 2,22%. Untuk realisasi anggaran sebesar Rp15.758.100,00 atau 13,53% dari target anggaran sebesar Rp116.483.680,00,-

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Indikator jumlah logistik kantor yang tersedia, dengan target 60 paket realisasi 1 paket sehingga tercapai sebesar 1,67%. Untuk realisasi anggaran sebesar Rp12.838.000,00 atau 16,94% dari target anggaran sebesar Rp75.806.326,00,-

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan target kinerja 118.096 lembar realisasi 6.506 lembar sehingga tercapai sebesar 5,51%. dan Untuk realisasi anggaran sebesar Rp10.003.500,00 atau 22,23 dari target anggaran sebesar Rp44.999.600,00,-

1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator jumlah bahan bacaan yang tersedia dengan target kinerja 1.120 Lembar, dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp180.000,00 atau 4,29% dari target anggaran sebesar Rp4.200.000,-

1.5.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Indikator jumlah laporan fasilitas tamu dengan target kinerja 12 laporan realisasi 1 Laporan sehingga tercapai sebesar 8,33%, Untuk realisasi anggaran

sebesar Rp495.000,00 atau 5,37% dari target anggaran sebesar Rp9.210.000,00,-

1.5.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan target kinerja 12 laporan, Untuk realisasi anggaran sebesar Rp4.701.136,00 atau 4,09% dari target anggaran sebesar Rp114.908.000,00,-

1.5.7 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Indikator jumlah penatausahaan arsip dinamis dengan target kinerja 12 dokumen, Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.375.000,00 atau 5,70% dari target anggaran sebesar Rp59.179.500,00,-

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 29 Unit, Dan untuk realisasi anggaran masil nol dikarenakan masih proses efisiensi anggaran dan untuk Uang Persediaan (UP) baru diterima tanggal 10 Februari 2024 dari target anggaran sebesar Rp153.801.045,00, kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 3 Jasa yaitu Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp142.753.762,00 atau 15,85% dari target anggaran sebesar Rp900.518.600,00, kegiatan ini terdiri dari:

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target kinerja 12 laporan realisasi 3 atau 25,00% digunakan untuk pembelian materai, biaya kirim surat tercatat, Dan untuk realisasi anggaran Rp526.400,00 atau 7,34% dari target anggaran sebesar Rp7.169.500,00,-

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator jumlah jasa komunikasi dan listrik dengan target kinerja 12 laporan realisasi 3 laporan atau 25,00% , hal ini digunakan untuk pembayaran listrik, Air, Telepon dan Air, Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp43.376.222,00 atau 17,55% dari target anggaran sebesar Rp247.180.000,00,-

1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator jumlah jasa pelayanan umum kantor dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 3 laporan, hal ini digunakan untuk pembayaran Honorarium PPK, Bendahara, Tenaga harian lepas, jasa tenaga kebesihan, Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp98.851.140,00 atau 15,30% dari target anggaran sebesar Rp646.169.100,00,-

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara dengan target kinerja 52 Unit realisasi 14 Unit sehingga capaian kinerja 26,92% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp25.432.750 atau 8,34% dari target anggaran sebesar Rp305.018.350,00, kegiatan ini terdiri dari :

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya, terealisasi 5,26% dari target kinerja 19 unit kendaraan dinas. Pemeliharaan kendaraan dinas ini diantaranya untuk pembelian BBM, Hergetasi, jasa kalibrasi (KIR) dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp19.324.750,00 atau 9,66% dari target anggaran sebesar Rp200.060.850,00,-

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, indikator jumlah mebel yang dipelihara dengan target kinerja 10 unit, Dan untuk realisasi anggaran masil nol dikarenakan masih proses efisiensi anggaran dan untuk Uang Persediaan (UP) baru diterima tanggal 10 Februari 2024 dari target anggaran sebesar Rp2.497.500,00

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 22 Unit, diantara untuk pemeliharaan computer, Printer, AC, Mesin Foto copy, latop, Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp5.927.000,00 atau 9,47% dari target anggaran sebesar Rp62.560.000,00

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp181.000,00 atau 0,45% dari target anggaran sebesar Rp39.900.000,00

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator capaian Program Prosentase Kenaikan Pajak Daerah dengan target 4,21%, Indikator Prosentase Kenaikan Retribusi Daerah dengan target 4,14%, Indikator Prosentase Kenaikan Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dengan target 16,2%, Indikator Prosentase Kenaikan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah dengan target 0,74%. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator jumlah Objek Pajak Baru dengan target kinerja 3 dokumen Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp4.951.750,00 atau 3,97% dari target anggaran sebesar Rp124.775.250,00

2.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen hasil analisa Pajak dan Retribusi Daerah target kinerja 1 Dokumen sedangkan Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp2.798.300,00 atau 3,89%dari target anggaran sebesar Rp71.921.200,00

2.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator jumlah penyuluhan kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 3 laporan atau 25,00%, Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp18.680.500,00 atau 5,84% dari target anggaran sebesar Rp320.063.000,00

2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Pajak Daerah dengan target kinerja 25 jenis Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp6.942.300,00 atau 1,52% dari target anggaran sebesar Rp455.535.800,00

2.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah dengan target kinerja 12 laporan Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp25.301.000,00 atau 7,45% dari target anggaran sebesar Rp339.616.700,00

2.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah target 2 laporan.

2.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Indikator jumlah penilaian PBB-P2 dan BPHTB dengan target kinerja 3000 OP realisasi 1.475 OP dan untuk realisasi anggaran masih nol dikarenakan masih proses efesiensi anggaran dan untuk Uang Persediaan (UP) baru diterima tanggal 10 Febuari 2024 dari target anggaran sebesar Rp35.859.500,00

2.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dengan target 24 dokumen terealisasi 6 Dokumen atau 25,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp75.698.000,00 atau 57,75% dari target anggaran sebesar Rp131.082.000,00

2.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan konsultasi dengan target kinerja 35.000 Layanan terealisasi 1.144 Layanan. dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp8.344.800,00 atau 11,94% dari target anggaran sebesar Rp69.865.000

2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Indikator jumlah capaian Penerimaan Pajak Daerah dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 3 dokumen atau 25,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp18.120.000,00 atau 1,49% dari target anggaran sebesar Rp1.217.782.050,00

2.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dengan target 12 dokumen terealisasi 3 dokumen atau 25,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp9.186.000,00 atau 1,60% dari target anggaran sebesar Rp573.858.700,00

2.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang selesai dengan target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.975.000,00 atau 9,82% dari target anggaran sebesar Rp40.488.250,00

2.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Indikator Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah dengan target kinerja 12 dokumen terealisasi 3 dokumen atau 25,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp19.205.000,00 atau 7,34% dari target anggaran sebesar Rp261.813.600,00

2.14 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 3 laporan atau 25,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp9.620.000,00 atau 16,16% dari target anggaran sebesar Rp59.544.400,00

2.3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD (sesuai perda SOTK) terdiri dari :

2.3.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pearangkat daerah kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis usrusan pemerintahan dibidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk difokuskan pada pelayanan pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.3.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadai dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan sebagaimana table berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Lambatnya Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	Penetapan target PAD belum sepenuhnya melalui kajian yang obyektif	Pemutakhiran Data Potensi PAD belum optimal
			Belum ada database acuan penetapan harga transaksi BPHTB yang obyektif dan transparan
		Kinerja pemungutan PAD kurang optimal data dukung	Kurang Optimalnya tim pemungutan PAD
			Kurangnya Kepatuhan membayar Pajak
			Terbatasnya dukungan operasional Kecamatan, Kelurahan untuk membantu pemungutan PAD
			Tidak adanya insentif bagi OPD penghasil retribusi
		Kualitas pelayanan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat	Digitalisasi layanan pajak belum optimal
			Kurangnya kemudahan dalam pelayanan pajak
			Lambatnya waktu penyelesaian layanan

		Kurang Optimalnya Pengendalian dan Pengawasan PAD	**Penegakan sanksi wajib pajak dan aparatur pajak yang melanggar regulasi pajak kurang optimal**
			Belum efektifnya sistem pengawasan penyimpangan pajak

2.3.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati nganjuk serta Program Nasional/Internasional yang mencakup Standar Pelayanan Minimal dam tujuan pembangungan berkelanjutan (SDG'S)

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***"Nganjuk yang maju, adil dan sejahtera"*** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya;
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai;
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai garda depan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke 4 (empat) Kabupaten Nganjuk yaitu "4. "Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;".

2.3.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat tantangan dan peluang.

- Tantangan yang dihadapi antara lain:
  1. Menurunnya peran Kecamatan dan Kelurahan membantu Bapenda disebabkan tidak adanya uraian tugas fasilitasi pajak daerah dan dukungan anggaran untuk tugas fasilitasi pajak daerah
  2. Belum seluruh desa berperan optimal dalam pendataan, penagihan, serta sosialisasi pajak daerah
  3. Kurang validnya self assessment disebabkan wajib pajak menghindari nilai pajak besar
  4. Berkurangnya kemampuan wajib pajak membayar pajak disebabkan kondisi perekonomian
  5. Kebijakan kepegawaian membatasi peluang menambah jumlah SDM khususnya untuk fungsi pendataan, penagihan, pelayanan
- PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

  Peluang yang dihadapi dalam pada tahun 2026, pengembangan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:
  1. Pemanfaatan teknologi digital yang bervariasi dan makin terjangkau untuk optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi
  2. Optimalisasi peran desa dalam pendataan, penagihan, edukasi pajak dengan meningkatkan motivasinya melalui pemberian BHPRD berbasis kinerja
  3. Peningkatan peran Kecamatan dalam tugas fasilitasi pajak melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati
  4. Kerjasama dengan Dinas Kominfo dalam pemutakhiran data pajak daerah
  5. Optimalisasi kinerja OPD pengampu retribusi melalui pemberian insentif atau skema lain yang dapat mendorong meningkatnya pemasukan retribusi

6. Tumbuhnya obyek dan subyek pajak baru sebagai akibat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk

2.3.3.5 Isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 -2026 isu- isu penting dan strategis untuk mengatasi permasalahan pada tahun 2026 antara lain :

1. Aparatur pelayanan pajak dan retribusi yang berintegritas, profesional dan memadai jumlah dan kompetensinya.
2. Digitalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi
3. Dukungan operasional kelurahan dan kecamatan dalam membantu pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi
4. Insentif OPD penghasil retribusi
5. Sinergitas Pemkab dan Pemprov dalam pengelolaan pajak daerah

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk Badan Pendapatan daerah kabupaten Nganjuk tidak ada usulan sehingga tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Nganjuk
Badan Pendapatan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 keselarasan dan dan sinergitas prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Prioritas nasional	Prioritas Propinsi	Prioritas Kabupaten Nganjuk	Nomenklatur program	Indikator Program	Target Indikator Program
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakatdi Jawa Timur	Meningkatkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-Gov)	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	- Prosentase Kenaikan Pajak Daerah - Prosentase Kenaikan Retribusi Daerah - Prosentase Kenaikan Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah - Prosentase Kenaikan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	- 4,21% - 4,14% - 16,20% - 0,74%

Sedangkan penyelarasan tujuan Nasional dan Sasaran Nasional, Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Timur serta Tujuan dan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel berikut :

Tujuan/Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator tujuan	sasaran	Indikator sasaran	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan tata kelola	Terwujudnya Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kemandirian Fiskal daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	Meningkatnya tatakelola Pemda yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya birikrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK terhadap LKPD

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- **Tujuan**

  Tujuan yang ditetapkan dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 ***"Nganjuk Akuntabel"*** Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indicator Indeks reformasi Birokrasi

dan yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 adalah "***Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah***" dengan indicator Prosentase PAD terhadap Pendapatan

- **Sasaran**

adapun sasaran dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan public yang prima dengan indukator Nilai SAKIP, Opini BPK terhadap LKPD, Nilai Maturitas SPIP, Indeks Pelayanan Publik dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2025-2029 adalah yang akan dicapai adalah "***Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah***", dengan Indikator Prosentase Kenaikan PAD. Target kinerja Tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah	***Prosentase PAD terhadap Pendapatan***	**19,48%**
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	***Prosentase Kenaiakan PAD***	**17,37%**

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk Perubahan tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

Pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp21.446.644.299,00

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

   Program ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas diantaranya digunakan untuk

   - Menyusun perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
   - Menyusun administrasi Keuangan daerah
   - Menyusun Administrasi Barang Milik Daerah
   - Menyusun Administrasi Kepegawaian
   - Menyusun Administrasi Umum
   - Pengadaan Barang Milik Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang
   - Pemeliharaan Barang Milik daerah

   Dengan sasaran Program :

   1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan Pajak
   2. Meningkatnya tata kelola Bapenda

   Indikator Program :

   1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan pajak
   2. Nilai Sakip Bapenda

   Program ini terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

   1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;**

      Kegitan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Sasaran Kegiatan ini Meningkatnya pengelolaan perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja dengan Indikator output

Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan hasil adalah Prosentase dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKAP, RTP, dan penyusunan perencanaan lainnya. Sasaran Sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan hasil Persentase dokumen perencanaan yang disusun, sehingga dengan adanya subkegiatan ini setiap program terencana dan tersusun dengan baik

1.2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi dan kinerja perangkat

Sasaran Subkegiatan ini Terlaksananya Evalual Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Output adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat dan hasil Prosentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini digunakan untuk menyusun pembayaran gaji dan tunjangan gaji dan pelaporan keuangan baik tahunan maupun bulanan, tribulan serta semester dengan Indikator Output Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang disusun dan hasil Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang tersusun. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan kegiatan diperuntukanpembayaran gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, Belanja Insentif dibagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak dan Retribusi daerah.

Sasaran Sub kegiatan ini terbayarkan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator keluaran Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN dan hasil

presentase dokumen gaji dan tunjangan ASN, sehingga terbayarkan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu.

2.2. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyusunan laporan akhir tahun.

Sasaran Sub kegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan Indikator keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan hasil persentase Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun, sehingga laporan akhir tahun tepat waktu.

2.3. **Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD**

Subkegiatan ini digunakan penyusunan laporan bulanan untuk pelaporan bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/trwulan/ dan semesteran

Sasaran Subkegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan Indikator keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan dan hasil persentase Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tepat waktu

3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadministrasian Barang Milik daerah dengan Sasaran Administrasi Barang Milik daerah yang dilaksanakan dengan indicator Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

3.1. **Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Subkegiatan ini laksanakan untuk penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan Sasaran Meningkatnya pengelolaan Penatausahaan BMD SKPD indicator hasil adalah Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah sehingga Barang milik Daerah dapat terinventarisasi dengan baik.

4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN, dan pengadministrasian Kepegawaian dengan Sasaran Tingkat disiplin ASN indicator Jumlah ASN yang hadir dan pulang tepat waktu. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

4.1. **Subkegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Sasaran Meningkatnya pengolahan administrasi kepegawaian Bapenda dengan indicator Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Dengan adanya subkegiatan ini administrasi kepegawaian tertib

4.2. **Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan**

Sasarannya Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan;

Indikator keluarannya jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Dengan adanya subkegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan indeks Penilaian ASN Bapenda dan juga tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan

5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah

Sasaranya adalah Meningkatnya pengelolaan pengadministrasian umum perangkat daerah.

Indikator Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan administrasi umum.

Hasilnya Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

5.1. **Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Digunakan untuk menyediakan alat tulis kantor, peralatan listrik peralatan kebersihan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor

Sasarannya adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Indikatornya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

5.2. **Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Digunakan untuk menyediakan makan minum harian ASN bahan kebersihan kantor, bahan kesehatan ASN Sasarannya adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Indikator keluaran adalah jumlah paket bahan logistic kantor dengan tersedianya bahan logistik kantor diharapkan memperlancar pelaksanaan tugas

5.3. **Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Digunakan untuk cetak kebutuhan adminstrasi kantor, cetak banner dan penggandaan berkas - berkas surat .

Sasarannya adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator keluarnya adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.

Dengan adanya Subkegiatan ini diharapkan dpat meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

5.4. **Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Digunakan untuk berlangganan surat kabar/Koran dan menyediakan buku buku peraturan dengan sasarannya adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan, sehingga terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum pegawai.

5.5. **Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Digunakan untuk menyediakan makan minum tamu dinas, dengan sasarannya adalah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu dan indikatornya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, sehingga dengan tersedianya kepeluan tamu dinas tercipta hubungan yang harmonis antara banyak pihak

5.6. **Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Digunakan untuk kebutuhan rapat, koordinasi dan konsultasi baik dalam kota maupun luar kota dan juga untuk menyediakan makan minum rapat dinas.

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Indikator keluarannya adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sehingga mampu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam menunjang tercapainya PAD.

5.7. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Digunakan untuk melaksanakan penataan arsip dinamis.

Sasarannya adalah Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda, dengan Indikator keluarannya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan sasarannya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah, sehingga dengan tercukupinya barang akan memperlancar pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

6.1. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasarannya adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indicator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan mengomptimalkan pelayan prima.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal di bidang pengadaaan jasa . Sasarannya adalah penyediaan jasa yang dilaksanakan, dengan Indikator hasil adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

7.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sehingga tercipta kelancaran dan kecepatan dalam kegiatan surat

menyurat.

7.2. **Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan, sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan kedinasan

7.3. **Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor**

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan kantor.

8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Sasaranya adalah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah, dengan Indikator adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, sehingga dapat menambah umur barang.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

8.1. **Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan**

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara sehingga terpenuhinya pemeliharaan,perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan / karyawati.

8.2. **Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya**

Sasaran Subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang dipelihara sehingga terciptanya

kenyamanan gedung tempat bertugas.

8.3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Sasarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

8.4. SubKegiatan Pemeliharaan Mebel

Sasarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Mebel, dengan Indicator Jumlah Mebel yang Dipelihara

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasarannya Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan indicator Prosentase Realisasi Pajak Daerah dan Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola,
2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah dengan indikator Jumlah Wajib pajak baru
3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi dengan Indikator Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Daerah.

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan indicator Prosentase Realisasi Pajak Daerah dan Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola,
2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah dengan indikator Jumlah Wajib pajak baru
3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi dengan Indikator Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Subkegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah Sasarannya adalah Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

2.1.2 Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta

Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.3 SubKegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

Sasarannya Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.4 Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhikewajibannya.

2.1.5 Sukegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah dan juga direncanakan untuk sensus PBB secara bertahap untuk memperbarui data PBB-P2 sehingga mampu tercapainya potensi dan data pajak daerah.

2.1.6 Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah,

Dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

2.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sasarannya adalah Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya, dengan Indikator Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

2.1.8 Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya data Ketetapan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

2.1.9 Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah sehingga dapat di ukur optimalnya pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

2.1.10 Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak

Sasarannya adalah Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi sehingga terdapat ketepatan data pelaporan Pajak

2.1.11 Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

2.1.12 Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

2.1.13 Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi

Sasarannya adalah terlaksanaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sehingga Pengelolaan Retribusi daerah bisa terkendali dengan baik.

2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Upaya Mengubah Transasksi Tunai menjadi Non Tunai, dengan Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah, sehingga transasksi pembayaran non tunai dapat di implementasikan

Pada Perubahan Renja tahun 2025 pagu atau anggaran mengalami pengurangan. pengurangan pagu anggaran dikarenakan kebijakan efesiensi anggaran.

kegiatan Badan Pendapatan daerah Sebagaimana table berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**22.868.973.882,00**	**20.479.629.676,00**	**21.448.644.788,00**	**-1.412.329.094,00**							**22.386.850.469,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**22.868.973.882,00**	**20.479.629.676,00**	**21.448.644.788,00**	**-1.412.329.094,00**							**22.386.850.469,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**22.868.973.882,00**	**20.479.629.676,00**	**21.448.644.788,00**	**-1.412.329.094,00**							**22.386.850.469,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak derah Nilai Sakip SKPD**				**80 85,25 Nilai %**	**85,25 90 % Nilai**	**17.288.788.882,00**	**15.464.629.676,00**	**16.806.140.848,00**	**102.051.607,00**							**17.390.850.489,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang sesuai*				13 dok	13 dok	40.422.000,00	40.422.000,00	30.602.000,00	-9.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun		40.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	20.475.000,00	20.475.000,00	15.275.000,00	-5.200.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	19.947.000,00	19.947.000,00	15.327.000,00	-4.620.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Keuangan yang selesai*				19 Laporan	19 Laporan	14.046.963.600,00	13.137.300.529,00	14.719.083.540,00	672.119.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Keuangan yang selesai		14.964.630.489,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	13.988.600.000,00	13.078.936.929,00	14.674.023.540,00	685.423.540,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.906.130.489,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.464.600,00	8.464.600,00	6.738.000,00	-1.726.600,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	49.899.000,00	49.899.000,00	38.322.000,00	-11.577.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diaksarakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	21.492.000,00	-3.508.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dirkumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	21.492.000,00	-3.508.000,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Tingkat Kehadiran ASN*				12 Laporan	12 Laporan	274.999.750,00	274.999.750,00	67.965.000,00	-207.034.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Laporan Tingkat kehadiran ASN		175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	4.999.800,00	4.999.800,00	3.645.000,00	-1.354.800,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	48 Orang	269.999.950,00	269.999.950,00	64.320.000,00	-205.679.950,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi umum yang dilaksanakan*				12 Laporan	12 Laporan	598.982.802,00	598.982.802,00	424.787.106,00	-174.175.696,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan		600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	159.998.700,00	159.998.700,00	116.483.680,00	-43.515.020,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	79.999.602,00	79.999.602,00	75.806.326,00	-4.193.276,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				118095 Paket	118095 Paket	59.999.800,00	59.999.800,00	44.999.600,00	-15.000.200,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1120 Dokumen	1120 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.210.000,00	-790.000,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	209.765.000,00	209.765.000,00	114.908.000,00	-94.857.000,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	74.999.700,00	74.999.700,00	59.179.500,00	-15.820.200,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dialokasi*				29 Unit	29 Unit	980.658.180,00	153.801.045,00	299.946.753,00	-680.711.427,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik daerah yang dialokasi		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dialokasikan				29 Unit	29 Unit	980.858.180,00	153.801.045,00	299.946.753,00	-680.711.427,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disiapkan/Alat*				3 Jasa	3 Jasa	927.904.200,00	929.124.200,00	936.246.100,00	8.341.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disiapkan/alat		853.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.949.500,00	7.189.500,00	27.897.000,00	21.947.500,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	247.180.000,00	247.180.000,00	262.180.000,00	15.000.000,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			247.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	674.774.700,00	674.774.700,00	646.169.100,00	-28.605.600,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				52 Unit	52 Unit	393.888.350,00	305.018.350,00	305.018.350,00	-88.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara		432.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	240.000.850,00	200.060.850,00	200.060.850,00	-39.940.000,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			240.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	2 497 500,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangunkidaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2 500 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	111 460 000,00	62 560 000,00	62 560 000,00	-48 900 000,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangunkidaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			150 000 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39 900 000,00	39 900 000,00	39 900 000,00	0,00	Kab. Nganjuk Nganjuk, Mangunkidaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40 000 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi retribusi daerah yang dikelola** **Jumlah Wajib Pajak Baru Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu**				**100** **386000** **992700 % WP** **WP**	**100** **386000** **992700 % WP** **WP**	**5.570.175.000,00**	**5.015.000.000,00**	**4.641.503.450,00**	**-866.175.000,00**							**5.005.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Wajib Pajak Baru Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Tepat Waktu Prosentase Realisasi Pajak Daerah* *Prosentase Realisasi Retribusi Daerah Daerah yang dikelola*				100 % 386000 oby oleshyek pajak 992700 oby oleshyek pajak	100 % 386000 oby oleshyek pajak 992700 oby oleshyek pajak	5 570 175 000,00	5 015 000 000,00	4 641 503 450,00	-928 671 550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD		5 005 000 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150 000 000,00	150 000 000,00	124 775 250,00	-25 224 750,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			150 000 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150 000 000,00	100 000 000,00	71 921 200,00	-78 078 800,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			150 000 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	450 000 000,00	350 000 000,00	345 000 000,00	-105 000 000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			350 000 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				25 Unit	25 Unit	550 000 000,00	500 000 000,00	487 261 800,00	-62 738 200,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			550 000 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	500 000 000,00	450 000 000,00	339 616 700,00	-160 383 300,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			700 000 000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				3000 Objek Pajak	3000 Objek Pajak	150.000.000,00	75.000.000,00	35.859.500,00	114.140.500,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Pendataan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	220.000.000,00	200.000.000,00	131.082.000,00	-88.918.000,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2 Layanan	2 Layanan	115.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00	1.217.782.050,00	-182.217.950,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	925.575.000,00	900.000.000,00	1.056.358.700,00	130.783.700,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	50.488.250,00	-19.511.750,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	389.600.000,00	370.000.000,00	311.813.600,00	-77.786.400,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	109.544.400,00	-90.455.600,00	Kab. Ngamuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab - Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		JUMLAH							**22.858.973.882,00**	**26.479.620.670,00**	**21.446.644.299,00**	**-462.266.143.769,04**							**22.396.830.488,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
    c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.